

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul R. Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia: Teori dan Contoh Kasus* (Jakarta: Prenada Media, 2004).
- Abdul, Saliman R., *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016).
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2004).
- Asikin, Zainal, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1990).
- Asyhadie, Zainie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan* (Jakarta: Erlangga, 2012).
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999).
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU Nomor 37 Tahun 2004)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2002).
- Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip Norma Dan Praktik Di Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2008.
- HMN. Purwosutjipto, 2005, *Pengertian Pokok Hukum Dagang 2; Bentuk-bentuk Perusahaan*, Jakarta: Djambatan.
- Jono, *Hukum Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*. (Jakarta: Djambatan, Cet ke-3, 2005).
- Mulyoto, *Kesalahan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar CV* (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2010).

- Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Nazruddin Safaat, *Rancang Bangun Aplikasi Multiplatform*, (Bandung: Informatika, 2015).
- Pawoto Wignjosumarto, *Hukum Kepailitan Selayang Pandang (Himpunan Makalah) Cet 1*, Jakarta: Tatanusa, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006).
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
- Purwosutjipto, HMN., *Pengertian Pokok Hukum Dagang 2; Bentuk-bentuk Perusahaan* (Jakarta: Djambatan, 2005).
- R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, (Bandung: Alumni Bandung, 2004).
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001).
- Ricardo Simanjuntak, *Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Indonesia: Teori dan Praktek*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2008.
- Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kontrak Di Berbagai Sistem Hukum* (Yogyakarta: FH UII Press, 2017).
- Salim dan Erlies Septiana Nurbana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).
- Satjipto Raharjod, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, cetakan ke (Jakarta: Kompas, 2009).
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Dagang* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008).
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2006).
- Shubhan, M. Hadi, *Hukum Kepailitan Prinsip Norma Dan Praktik Di Peradilan* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2008).
- Simanjuntak, Ricardo, *Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Indonesia: Teori dan Praktek* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2008).

- Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2010).
- Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1 Bagian Kedua*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hlm. 102
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1986).
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997).
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2022).
- Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018).
- Wignjosumarto, Pawoto, *Hukum Kepailitan Selayang Pandang (Himpunan Makalah) Cet 1* (Jakarta: Tatanusa, 2003).
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Zainal Asikin Amarudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).
- Zainie Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, (Jakarta: Erlangga, 2012).

JURNAL

- Abhimantara, I. B. (2019). Kedudukan Persekutuan Komanditer (Commanditaire Venootschap) Sebagai Corporate Guarantee. *Jurnal Notaire*, Vol. 2, No. 3, hlm. 360.
- Adam, C. K., Vazkya, N. K. R. S., Adam, S. R. P., & Rizkiyansyah, M. R. F. (2024). Analisis Hukum Tanggung Jawab dan Implikasi Persekutuan: Studi pada

Persekutuan Perdata, Firma, dan CV. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 2, No. 4.

Aditya, T. A. C. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Perdamaian Yang Telah Dihomologasi Karena Bertentangan Dengan Ketentuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). *Dharmasisya*, Vol. 1, Article 33.

Agustin, W. (2022). Tanggung Gugat Pesero Yang Dinyatakan Pailit Selaku Pemegang SHGB an Commanditaire Vennnootschap. *UNES Law Review*, Vol. 5, No. 2, hlm. 379-393.

D Disemadi, H. S., & Gomes, “Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 123–24.

Dari, W., & Sudirman, M. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Adanya Kepailitan (Studi Putusan No. 31/Pdt. Sus-Pailit/2023/Pn Niaga Jkt. Pst.). *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Humaniora*, Vol. 4, No. 1.

Diani, R., & Kusuma, M. (2020). Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennnootschap Atau CV) Sebagai Badan Usaha Dalam Kajian Hukum Perusahaan. *Justici*, Vol. 13, No. 1, hlm. 79-97. DOI: <https://doi.org/10.35449/justici.v13i1.181>

Fauzi, D. A. (2025). Implementasi Homologasi Dalam Proses PKPU Terhadap Efektivitas Rencana Perdamaian Untuk Menjaga Keseimbangan Kepentingan Debitur Dan Kreditur. *Jurnal Niara*, Vol. 18, No. 3, hlm. 819-831.

Ghiffary, K. A., & Toha, K. (2022). Analisis Yuridis Penyimpangan Pasal 285 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 pada Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dikaitkan dengan Syarat Sah Perjanjian. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, No. 5, hlm. 6183-6196.

H. A Santoso, “PTB,”” *Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU* 36, no. 3 (2021): 325–34.

- Harahap, S. M. (2021). Pelaksanaan Pendaftaran Persekutuan Komanditer (Cv), Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata Di Kota Medan. *Journal Law of Deli Sumatera*, Vol. 1, No. 1.
- Herlambang, T., dkk. (2017). Kepastian Hukum Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Perjanjian Yang Telah Disahkan (Homologasi). *Jurnal Nuansa Kenotariataan*, Vol. 3, No. 1, hlm. 24.
- Kansil, C. S., & William, L. (2023). Tinjauan Yuridis Akibat Kelalaian Debitur dalam Memenuhi Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 2, hlm. 2096-2103.
- Lathifah, P. L. U., & Putrijanti, A. (2026). Perseroan Komanditer sebagai Subjek Kepailitan dan Akibat Hukum Putusan terhadap Sekutu serta Kreditor: Studi Putusan PN Niaga Medan Nomor 6/Pdt. Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn. *UNES Law Review*, Vol. 8, No. 3, hlm. 843-853.
- Mahmudah, S. (2023). Upaya Hukum Terhadap Putusan Homologasi Dalam Perkara Kepailitan. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, Vol. 1, No. 1, hlm. 107–116.
- Mantili, R., & Dewi, P. E. T. (2020). Perlindungan Kreditor Konkuren Dalam Hukum Kepailitan. *Jurnal Akses*, Vol. 12, No. 2, hlm. 97-108. DOI: <https://doi.org/10.70358/jurnalakses.v12i2.681>
- Murniati, R. (2018). Asas Tanggung Renteng pada Bentuk Usaha Bukan Badan Hukum dan Akibat Hukum Bagi Harta Perkawinan. *Cepalo*, Vol. 2, No. 2, hlm. 113-122. DOI: <https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1768>
- Muslim, A. F. (2017). Tanggung Jawab Pengurus Persekutuan Komanditer (Cv) Dalam Keadaan Pailit. *Jurnal Reformasi Hukum*, XXI, Vol. 2.
- Oktafianur, M. D., Ferdiyansyah, F., Warsito, R., & Azizah, T. P. (2024). Tinjauan Hukum Terhadap Persekutuan Komanditer Perbedaan Status dan Perilaku. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 2, No. 3.

- Partyani, K. C. M. (2019). Pertentangan Norma Dalam Pengaturan Pendaftaran dan Pendirian Commanditaire Vennootschap (CV). *Vyavahara Duta*, Vol. 14, No. 1, hlm. 68-77.
- Putra, S. D. (2023). ANALISIS MENGENAI PENERAPAN PRINSIP DEBT COLLECTION DAN KETIADAAN PRINSIP DEBT FORGIVENESS DALAM UNDANG-UNDANG KEPAILITAN. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 2, hlm. 28-33. DOI: <https://doi.org/10.24912/jssh.v1i2.26596>
- Ramadhan, M. R., Suryanti, N., & Yunitasari, D. (2025). Analisis Terhadap Perdamaian Dalam Kepailitan Yang Diawali Dengan Penolakan Perdamaian Dalam PKPU. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 3, No. 3.
- Retnaningsih, S. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Pailit Individu dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 3, No. 1, hlm. 1-16. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v3i1.41>.
- Ritonga, F. G. (2024). Pembatalan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Sebagai Upaya Hukum Bagi Kreditor Terhadap Debitor Yang Lalai Memenuhi Isi Perjanjian Perdamaian. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Vol. 10, No. 1, hlm. 73-86.
- Santriany Mahmudah. (2023). Upaya Hukum Terhadap Putusan Homologasi Dalam Perkara Kepailitan. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, Vol. 1, No. 1, hlm. 107–116. <https://doi.org/10.24905/plj.v1i1.12>
- Susetyo, H. (2021). Kedudukan Firma Dan CV Beserta Anggota Sekutunya Dalam Hukum Kepailitan. *Law, Development and Justice Review*, Vol. 4, No. 1, hlm. 70-80. DOI: <https://doi.org/10.14710/ldjr.v4i1.11958>
- Susetyo, H. (2021). Kedudukan Firma Dan CV Beserta Anggota Sekutunya Dalam Hukum Kepailitan. *Law, Development and Justice Review*, Vol. 4, No. 1, hlm. 70-80.
- Talingan, C., Arroffii, D. Y. T., & Januar, M. (2024). Analisis Homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Nomor

134/Pdt. Sus-PKPU/2023/PN. Niaga. Jkt. Pst). *Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal*, Vol. 2, No. 9, hlm. 875-883.

Tanriawan, F. O., Aprilianda, N., & Susilo, H. (2023). Urgensi Pesero Komanditer Memberi Persetujuan kepada Pesero Pengurus dalam Melakukan Tindakan Kepemilikan. *Jurnal USM Law Review*, Vol. 6, No. 2, hlm. 512-525.

Tantri Herlambang, dkk. Kepastian Hukum Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Perjanjian Yang Telah Disahkan (Homologasi), *Jurnal Nuansa Kenotariataan*, Vol.3, No.1 (2017), hlm. 24.

Taqiya, Z., Suryanti, N., & Suryamah, A. (2023). Penagihan Utang Pajak Terhadap Direksi Perseroan Yang Dinyatakan Pailit Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVIII/2020. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 5, hlm. 4903-4917.

Utama, F. R. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan CV. XXX di Kota Metro. *Journal of Sriwijaya Community Services*, Vol. 5, No. 1, hlm. 57-66. DOI: <https://doi.org/10.29259/jscs.v5i1.179>

Willem, R., & Rajab, A. K. (2025). Kedudukan Harta Kekayaan Debitur sebagai Jaminan Umum dalam Proses Ketidakmampuan Membayar Utang. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 5, No. 3, hlm. 5114-5120.

Yedija, I. T., Yuhelson, Y., & Nurhakim, N. (2024). Eksistensi Perdamaian Dalam Kepailitan Terkait Akibat Pembatalan Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Dan Pembayaran Utang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 4, hlm. 12347-12358.

Yohana, Y. (2015). Tanggung Jawab Hukum Atas Bentuk Usaha Badan Hukum Dan Bentuk Usaha Non Badan Hukum. *Jurnal Mercatoria*, Vol. 8, No. 1, hlm. 46-53. DOI: [10.31289/mercatoria.v8i1.646](https://doi.org/10.31289/mercatoria.v8i1.646)